

Audit BPK Dimulai, Baubau Targetkan Kembali Raih Opini WTP 2025, OPD Baubau Diminta Tetap Siaga di Daerah



Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang saat ini tengah memasuki tahap pemeriksaan terperinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Komitmen tersebut ditegaskan seiring dimulainya proses audit lanjutan yang menjadi penentu kualitas tata kelola keuangan daerah.

Tahapan ini secara resmi diawali melalui entry meeting antara jajaran Pemerintah Kota Baubau dan tim BPK yang digelar di ruang rapat Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata, pada Jumat (3/4/2026).

Lanjut ke Hal: 7

Ramah Tamah dan Halal Bihalal Bapas Baubau Pasca Idul Fitri 1447 H Jadi Ajang Perkuat Koordinasi Mitra



Laporan: Firman

BAUBAU, BP -Upaya memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mendukung sistem pemasaran terus didorong Balai Pemasaran (Bapas) Kelas II Baubau melalui kegiatan ramah tamah dan halal bihalal pasca Hari Raya Idul Fitri yang digelar di Baubau, Selasa (31/3/2026). "Ramah Tamah dan Halal Bihalal Bapas Baubau Pasca Idul Fitri 1447 H Jadi Ajang

Perkuat Koordinasi Mitra Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai unsur mitra strategis, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga keuangan, media, hingga tokoh masyarakat. Hadir di antaranya perwakilan Bank Rakyat Indonesia, Kejaksaan Negeri Baubau, Lapas Baubau, BNN Baubau, Imigrasi Baubau, Polres Baubau, Pengadilan Baubau, serta jajaran internal Bapas Baubau.

Dalam forum terse-

but, Kepala Bapas Kelas II Baubau Nasirudin menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antar lembaga sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas layanan masyarakat.

"Momentum Idul Fitri menjadi ruang refleksi untuk memperbaiki hubungan sekaligus memperkuat koordinasi kerja lintas sektor," ujar Nasirudin dalam sambutannya.

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Fokus Benahi ASN Sesuai Pertek BKN dan Konektivitas Wilayah Buton Selatan



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terus mendorong reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur secara bertahap pada 2026, ditandai dengan pelantikan 105 aparatur sipil negara (ASN) oleh Bupati H. Muhammad Adios.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan sistem pemerintahan daerah agar lebih profesional, efektif, dan sesuai dengan arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat.

Di saat yang sama, pemerintah daerah juga tengah menggenjot pembangunan konektivitas wilayah, termasuk rencana

pembangunan pelabuhan ferry di Pulau Batu Atas yang diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bupati Adios mengatakan, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembenahan sumber daya manusia aparatur sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan.

"Untuk membangun daerah ini, yang pertama kami benahi adalah pemerintahan, khususnya ASN. Semua harus mengikuti petunjuk teknis dari BKN," kata Adios, Jumat (3/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam proses penataan tersebut, pemerintah daerah mengambil langkah tegas

dengan mencabut sejumlah surat keputusan (SK) lama dan meminta arahan langsung dari BKN pusat.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh kebijakan kepegawaian berjalan sesuai regulasi nasional, sekaligus menghindari persoalan administratif di kemudian hari.

"Kalau tidak mengikuti arahan BKN, dampaknya bisa menghambat kenaikan pangkat dan golongan ASN," ujarnya.

Selain itu, para pejabat yang dilantik diwajibkan mengikuti uji kompetensi sebagai bagian dari sistem merit dalam birokrasi modern.

Adios menegaskan, proses pembenahan aparatur

Lanjut ke Hal: 7

Serahkan LKPD ke BPK, Bupati Buton Tengah Dr Azhari Tegaskan Transparansi



Laporan: Ardi

KENDARI, BP-Komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan kembali ditegaskan dalam penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tenggara kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Selasa (31/3/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung di aula kan-

tor BPK tersebut, Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, turut hadir bersama gubernur serta para bupati dan wali kota lainnya.

Penyerahan LKPD ini merupakan kewajiban tahunan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada negara, sekaligus menjadi dasar audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, memimpin

langsung penandatanganan berita acara penyerahan LKPD bersama seluruh kepala daerah kabupaten/kota.

"Penyerahan LKPD ini bukan sekadar formalitas, tetapi wujud tanggung jawab kita kepada masyarakat atas pengelolaan anggaran daerah," ujar Andi Sumangerukka dalam sambutannya.

Bupati Buton Tengah,

Lanjut ke Hal: 7

Audit BPK Dimulai, Baubau Targetkan Kembali Raih Opini WTP 2025, OPD Baubau Diminta Tetap Siaga di Daerah

Pertemuan tersebut menjadi penanda dimulainya pemeriksaan mendalam atas laporan keuangan yang sebelumnya telah diserahkan tepat waktu pada 31 Maret 2026.

Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darus Salam, menyatakan bahwa seluruh perangkat daerah diminta memberikan dukungan penuh selama proses audit berlangsung. Ia menekankan pentingnya sikap kooperatif dalam memastikan kelancaran pemeriksaan. "Kita berharap seluruh OPD bersikap terbuka, kooperatif, dan proaktif dalam menyajikan data yang dibutuhkan oleh tim BPK," ujar La Ode Darus Salam dalam keterangannya.

Ia menambahkan, pemeriksaan lapangan oleh tim auditor dijadwalkan berlangsung sejak 1 April hingga akhir Mei 2026, mencakup serangkaian tahapan mulai dari pengujian dokumen hingga verifikasi langsung di lapangan.

Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, Sekda menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD dan bendahara agar tidak meninggalkan daerah selama masa pemeriksaan

berlangsung. Kehadiran mereka dinilai krusial dalam memberikan penjelasan atas data dan dokumen yang diperiksa.

"Para pejabat tidak diperkenankan keluar daerah selama pemeriksaan berlangsung, kecuali dalam kondisi mendesak dan harus mendapatkan izin dari pimpinan serta persetujuan tim BPK," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa transparansi dan profesionalisme menjadi prinsip utama dalam menjaga integritas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurutnya, hal tersebut menjadi fondasi dalam mempertahankan kepercayaan publik.

Sementara itu, Pemeriksa Ahli Muda BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, Harmita Amaliana, menjelaskan bahwa pemeriksaan terperinci ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan pada Februari 2026.

"Pemeriksaan terperinci berlangsung pada 2 April hingga 1 Mei 2026, dengan fokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undan-

gan," jelas Harmita.

Ia menyebutkan, sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam audit antara lain kecukupan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Selain itu, tim BPK juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan, termasuk pengembalian kelebihan pembayaran, sebelum batas waktu yang ditentukan pada 22 Mei 2026.

Tahapan berikutnya adalah penyusunan rencana aksi yang dijadwalkan pada 22-23 Mei 2026, serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada 24-31 Mei 2026.

Secara historis, opini WTP dari BPK merupakan indikator utama keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah di Indonesia sejak diberlakukannya reformasi keuangan negara pasca krisis 1998. Berdasarkan data BPK, jumlah pemerintah daerah yang meraih WTP terus meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, mencerminkan perbaikan sistem akunt-

abilitas publik.

Di tingkat global, standar audit sektor publik mengacu pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas sebagai pilar utama pengelolaan keuangan negara.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Baubau dinilai perlu menjaga konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, terutama dalam menghadapi dinamika pengelolaan anggaran yang semakin kompleks.

"Muara dari seluruh proses ini adalah bagaimana kita bisa mempertahankan opini WTP dengan kualitas laporan keuangan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," kata La Ode Darus Salam.

Dengan dimulainya pemeriksaan terperinci ini, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menunjukkan kinerja optimal dalam mendukung proses audit, sekaligus memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. (*)

Serahkan LKPD ke BPK, Bupati Buton Tengah Dr Azhari Tegaskan Transparansi

bahwa pemerintahannya terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan agar memenuhi standar yang ditetapkan.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel," kata Azhari.

Ia menambahkan, penyusunan LKPD harus dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi, bukan sekadar kewajiban administratif tahunan.

"Laporan keuangan adalah cerminan kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami terus melakukan perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan," ujarnya.

Secara historis, kewajiban penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, yang kemudian diperkuat dengan regulasi turunan lainnya, termasuk standar akuntansi pemerintahan.

Dalam praktiknya, BPK memberikan opini atas LKPD, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Secara global, praktik audit keuangan pemerintah juga dilakukan oleh lembaga audit tertinggi di berbagai negara, seperti Government Accountability Office (GAO) di Amerika Serikat dan National Audit Office (NAO) di Inggris, yang berfungsi menjaga akuntabilitas publik.

Penyerahan LKPD menjadi langkah awal dalam proses audit, di mana BPK akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap laporan tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta kewa-

jaran penyajian laporan.

Melalui proses ini, pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.

"Kami berharap hasil audit nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan," kata Azhari.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum bagi seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.

Dengan penyerahan LKPD yang tepat waktu, pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam menjalankan prinsip good governance serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tingkat daerah. (*)

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Fokus Benahi ASN Sesuai Pertek BKN dan Konektivitas Wilayah Buton Selatan

tur tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan tahapan yang terukur dan kesabaran.

"Pembinaan ASN ini tidak mudah, tidak seperti membalik telapak tangan," katanya.

Di sektor pembangunan wilayah, pemerintah daerah juga mulai merealisasikan Program Kampung Nelayan Merah Putih yang telah dibangun di Teluk Lande dan akan diperluas ke Pulau Siompu, kawasan Bahari, hingga Pulau Batu Atas.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan warga Buton Selatan.

Sementara itu, rencana pembangunan Kantor Bupati Buton Selatan juga tengah dipersiapkan, dengan agenda peletakan batu pertama dalam waktu dekat.

Adios menyebutkan, kegiatan tersebut akan melibatkan Gubernur serta tokoh adat Parabela sebagai simbol kebersamaan dan identitas daerah.

"Kantor bupati ini adalah kebanggaan masyarakat Buton Selatan, sehingga kita

ingin semua pihak hadir," ujarnya.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh program tidak lagi terkendala oleh rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang sebelumnya menjadi hambatan.

Pendekatan berbasis data juga menjadi strategi utama pemerintah daerah dalam mengakses dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

"Kalau ke Jakarta, kita tidak hanya membawa cerita, tapi harus membawa data agar mereka yakin," kata Adios.

Secara historis, reformasi birokrasi di Indonesia telah menjadi agenda nasional sejak era reformasi 1998, yang kemudian diperkuat melalui penerapan sistem merit dalam manajemen ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Di tingkat global, reformasi birokrasi juga menjadi tren di berbagai negara berkembang, seperti Korea Selatan dan Singapura, yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui profesionalisasi aparatur dan sistem rekrutmen

berbasis kompetensi.

Langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dinilai sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Selain pembenahan birokrasi, pembangunan infrastruktur konektivitas seperti pelabuhan ferry juga menjadi bagian penting dalam membuka akses ekonomi antar-wilayah kepulauan.

Adios berharap, upaya yang dilakukan secara bertahap tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, meskipun perubahan tidak terjadi secara instan.

"Mudah-mudahan tahun 2026 ini sudah mulai terlihat perubahan, walaupun sedikit," ujarnya.

Dengan kombinasi reformasi ASN dan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menargetkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)

Ramah Tamah dan Halal Bihalal Bapas Baubau Pasca Idul Fitri 1447 H Jadi Ajang Perkuat Koordinasi Mitra

Ia menambahkan, sinergi yang terbangun selama ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tugas pembinaan dan pengawasan warga binaan di wilayah Baubau.

"Kami mengapresiasi dukungan seluruh mitra. Tanpa kolaborasi yang baik, pelaksanaan tugas pemasyarakatan tidak akan berjalan optimal," katanya.

Namun demikian, Nasirudin juga mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas kantor Bapas Baubau masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

"Kondisi kantor kami masih sangat sederhana. Kami berharap ada dukungan, baik melalui hibah maupun relokasi, agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan," ujarnya.

Selain memperkuat jejaring kelembagaan, kegiatan ini juga menjadi ajang promosi ha-

sil karya warga binaan berupa produk olahan seperti kacang mete, keripik, dan kopi dengan label Butonik.

Produk tersebut merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian ekonomi yang bertujuan mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan setelah kembali ke masyarakat.

"Melalui produk ini, kami ingin menunjukkan bahwa warga binaan memiliki potensi yang bisa dikembangkan secara produktif," tambah Nasirudin.

Secara historis, konsep pemasyarakatan di Indonesia mulai diperkenalkan secara resmi pada 1964 oleh Menteri Kehakiman saat itu, Sahardjo, yang mengubah pendekatan sistem pembinaan berbasis kemanusiaan.

Transformasi tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, yang menegaskan pentingnya pembinaan dan reintegrasi sosial bagi warga binaan.

Di tingkat global, pendekatan serupa juga berkembang melalui prinsip-prinsip yang diadopsi dalam "United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner" atau yang dikenal sebagai Mandela Rules, yang menekankan perlakuan manusiawi dan rehabilitasi narapidana.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Bapas memiliki peran strategis sebagai penghubung antara warga binaan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memastikan proses reintegrasi berjalan efektif.

Kegiatan ramah tamah ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, mencerminkan nilai spiritualitas yang menjadi bagian penting dalam momentum Idul Fitri sebagai ajang saling

memaafkan.

Nasirudin juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh mitra apabila selama ini terdapat kekurangan dalam koordinasi maupun pelayanan.

"Kami menyadari masih ada kekurangan, untuk itu kami memohon maaf sekaligus membuka ruang perbaikan ke depan," katanya.

Ke depan, Bapas Baubau berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus diperkuat, termasuk dengan pihak swasta, guna menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya ketertiban sosial serta meningkatkan keberhasilan program pembinaan warga binaan secara berkelanjutan. (*)

Jokowi Hormati Keteguhan Iran, Bahas Konflik dan Dampak Global



Presiden Jokowi menghormati keteguhan Iran dalam mempertahankan kedaulatan saat bertemu Dubes Iran

Laporan: Alwan

SOLO, BP-ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menerima Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di kediamannya di Kota Surakarta, Rabu (1/4), dalam pertemuan yang membahas eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah serta dampaknya terhadap kemanusiaan dan stabilitas global.

Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadi Jokowi di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, dengan dihadiri jajaran staf Kedutaan Besar Iran di Indonesia. Agenda utama pertemuan difokuskan pada perkembangan terkini situasi keamanan regional.

Dalam kesempatan itu, Boroujerdi menyampaikan laporan menyeluruh mengenai kondisi di Iran pascaserangan yang terjadi pada akhir Februari. Ia memaparkan bahwa sejumlah fasilitas sipil dan infrastruktur vital mengalami kerusakan signifikan.

Menurut Borou-

jerdi, serangan tersebut tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memicu krisis kemanusiaan yang meluas. "Kami menghadapi dampak serius terhadap masyarakat sipil akibat serangan terhadap fasilitas penting," ujarnya.

Situasi memanas setelah serangan militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat bersama Israel pada 28 Februari lalu. Serangan itu disebut menimbulkan korban besar, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta ribuan warga sipil.

Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan balasan yang menasar wilayah Israel dan aset Amerika Serikat di kawasan Teluk, sehingga meningkatkan ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.

Menanggapi kondisi itu, Jokowi menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi yang berkembang. Ia menilai bahwa konflik yang berkepanjangan berpotensi memperburuk stabilitas regional

dan global.

"Saya menyampaikan simpati mendalam kepada rakyat Iran, serta menghormati keteguhan dalam mempertahankan kedaulatan nasional," kata Jokowi dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun resmi media sosialnya.

Jokowi juga menegaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. "Harapan kita semua, perdamaian, stabilitas, dan ketenangan dapat segera kembali di kawasan," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak turut bertukar pandangan mengenai dinamika geopolitik yang lebih luas, termasuk potensi dampak konflik terhadap negara-negara berkembang dan stabilitas ekonomi global.

Secara historis, hubungan Indonesia dan Iran telah terjalin cukup lama, terutama sejak era Konferensi Asia-Afrika 1955 yang menekankan solidaritas negara-negara berkembang dalam menjaga kedaulatan dan menolak intervensi asing.

Indonesia sendiri selama ini dikenal konsisten mendorong penyelesaian konflik internasional melalui diplomasi damai, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah dijalankan sejak awal kemerdekaan.

Di tingkat global, ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, telah berlangsung selama beberapa dekade, termasuk sejak Revolusi Iran 1979 yang mengubah lanskap politik kawasan Timur Tengah.

Eskalasi terbaru ini memunculkan kekhawatiran baru akan potensi konflik terbuka yang lebih luas, mengingat keterlibatan aktor-aktor besar dalam dinamika tersebut.

Pertemuan antara Jokowi dan Dubes Iran tersebut mencerminkan peran Indonesia sebagai negara yang aktif dalam mendorong dialog dan perdamaian di tengah meningkatnya ketegangan global. (*)

DPR Apresiasi Polri, Mudik 2026 Lebih Tertib dan Kondusif



Ilustrasi. DPR apresiasi soalnya pengamanan lalu lintas oleh Polri soal arus mudik lebaran 2026. Dok

Laporan: Radit

JAKARTA, BP-Komisi III DPR RI menilai pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2026 berlangsung lebih tertib dan terkendali, dengan indikator utama berupa menurunnya angka kecelakaan lalu lintas serta tidak ditemukannya kemacetan parah di jalur-jalur utama.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokman, yang menyebut keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi lintas instansi dalam pengamanan mudik yang digelar sejak awal hingga puncak arus balik pada awal April 2026.

Menurut dia, penerapan berbagai strategi rekayasa lalu lintas menjadi faktor kunci dalam mengurai kepadatan kendaraan, terutama di ruas jalan tol dan jalur nasional yang selama ini dikenal rawan kemacetan.

"Penyelenggaraan mudik tahun ini menunjukkan hasil yang sangat positif di berbagai aspek, khususnya dalam penurunan angka kecelakaan lalu lintas," kata Habiburokman, Kamis (2/4). Ia menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah pengamanan yang diterapkan berjalan efektif dalam menjaga keselamatan pemudik di berbagai daerah.

Selain aspek lalu lintas, Komisi III DPR juga menyoroti situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang relatif kondusif selama periode mudik, baik di daerah asal maupun tujuan pemudik.

Habiburokman menyebut peningkatan patroli aparat ke-

polisian di berbagai wilayah turut menekan angka kriminalitas selama masa libur Lebaran.

"Angka kecelakaan bisa ditekan, artinya strategi pengamanan dan rekayasa lalu lintas berjalan sangat efektif," ujarnya.

Situasi keamanan juga terpantau stabil di kawasan Jabodetabek yang ditinggalkan sebagian besar warganya untuk mudik, maupun di daerah tujuan seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi tujuan utama perjalanan.

Ia juga menegaskan bahwa tidak adanya kemacetan parah menjadi indikator penting keberhasilan pengelolaan arus mudik tahun ini, berbeda dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way dan contraflow terbukti mampu mengurai kepadatan kendaraan secara signifikan," tutur dia.

Keberhasilan tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang digelar oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

DPR pun memberikan apresiasi kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho atas keberhasilan pengamanan tersebut.

"Ini hasil kerja keras dan koordinasi yang baik antarinstitusi dan personel di lapangan," kata Habiburokman.

Secara historis, arus mudik Lebaran di Indonesia merupakan salah satu

pergerakan manusia terbesar di dunia, dengan jumlah pemudik yang dalam beberapa tahun terakhir mencapai lebih dari 100 juta orang setiap musimnya.

Pada Lebaran 2025, pemerintah mencatat masih terjadi sejumlah titik kemacetan panjang di jalur Pantura dan jalan tol Trans Jawa, serta angka kecelakaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan tahun ini.

Sementara itu, secara global, fenomena mobilitas massal saat hari besar keagamaan juga terjadi di sejumlah negara, seperti arus mudik Tahun Baru Imlek di China yang dikenal sebagai "Chunyun", yang melibatkan miliaran perjalanan setiap tahunnya.

Namun, pengelolaan mudik di Indonesia dinilai semakin membaik dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan peningkatan infrastruktur jalan dan sistem manajemen lalu lintas berbasis teknologi.

Habiburokman berharap capaian positif pada 2026 dapat menjadi acuan untuk penyelenggaraan mudik di masa mendatang agar semakin aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat.

Ia juga mendorong agar pola pengamanan dan rekayasa lalu lintas terus disempurnakan, termasuk melalui evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah diterapkan.

Dengan berbagai indikator tersebut, DPR menilai mudik Lebaran 2026 sebagai salah satu yang paling terkendali dalam beberapa tahun terakhir. (*)

Gubernur Sultra ASR Tekankan Efisiensi Anggaran di Tengah Tekanan Fiskal



Laporan: Mashuri

S U L T R A , BP-Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperketat kebijakan pengelolaan anggaran dengan mengarahkan seluruh program pembangunan agar berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan dan memperluas akses layanan dasar.

Kebijakan tersebut ditegaskan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (30/3/2026).

Dalam arahannya, gubernur menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak lagi diukur dari banyaknya program yang dijalankan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

“Program harus berdampak nyata. Itu yang menjadi ukuran keberhasilan kita,” ujar Andi Sumangerukka.

Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menuntut efisiensi menyeluruh di semua lini pemerintahan. Anggaran yang terbatas harus diarahkan pada kebutuhan prioritas dan menghindari pemborosan.

“Anggaran kita terbatas. Tidak

boleh ada pemborosan, termasuk perjalanan dinas yang tidak mendasak,” katanya.

Menurutnya, tekanan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Fenomena ini sejalan dengan tren internasional pascapandemi COVID-19 yang mendorong banyak pemerintah melakukan pengurangan anggaran.

Di tingkat nasional, kebijakan efisiensi anggaran juga telah menjadi bagian dari reformasi fiskal sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan keuangan berbasis kinerja.

Gubernur menjelaskan, fokus utama pembangunan daerah saat ini adalah memutus rantai kemiskinan yang masih berada di kisaran 10 persen di Sulawesi Tenggara.

“Intervensi harus tepat sasaran agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas, namun harus memiliki nilai ekonomi yang jelas

bagi masyarakat. Infrastruktur seperti jalan diharapkan mampu membuka akses dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga.

Dalam sektor pendidikan, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk menjaga transparansi pengelolaan anggaran, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Pendidikan adalah kunci masa depan. Tidak boleh ada penyimpangan dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

Sementara itu, di bidang kesehatan, Pemprov Sultra menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 100 persen. Saat ini, cakupan tersebut masih berada di angka sekitar 89 persen.

Kebijakan ini sejalan dengan program nasional Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sejak diluncurkan pada 2014 sebagai bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia.

Selain fokus pada program prioritas, pemerintah daerah juga tengah mengkaji penyesuaian sistem kerja

ASN sebagai bagian dari efisiensi anggaran, termasuk kemungkinan penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home.

Namun demikian, gubernur menegaskan bahwa perubahan sistem kerja tidak boleh mengganggu pelayanan publik.

“Apapun sistem kerja yang diterapkan, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” ujarnya.

Apel gabungan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, staf ahli gubernur, para asisten, kepala OPD, kepala biro, serta ribuan ASN di lingkungan Pemprov Sultra.

Di akhir arahnya, gubernur mengingatkan seluruh jajaran agar memastikan setiap kebijakan tidak berhenti pada tahap perencanaan semata, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten.

Dengan penekanan pada efisiensi, akuntabilitas, dan dampak nyata, Pemprov Sultra berharap kebijakan pembangunan yang dijalankan mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah tantangan global. (*)

Gubernur Sultra ASR Luncurkan SPPG, Dorong Kualitas SDM Sejak Dini



Laporan: Lisna

S U L T R A , BP-Upaya pemerintah dalam memperkuat pemenuhan gizi masyarakat terus diperluas melalui pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Polresta Kendari, yang diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, Senin (30/3/2026). Fasilitas ini diproyeksikan menjadi pusat layanan gizi terpadu bagi pelajar di wilayah tersebut.

Keberadaan SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur umum, tetapi juga sebagai pusat distribusi makanan bergizi yang dikelola secara terintegrasi, mulai dari pengolahan bahan pangan hingga penyaluran ke sekolah-sekolah sasaran.

Program ini merupakan bagian dari implementasi Program Makan Gizi Gratis yang dicanangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak usia sekolah, sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya menjaga kualitas layanan. “SPPG ini harus menjadi standar baru dalam pelayanan gizi. Kita ingin memastikan makanan yang disajikan benar-benar sehat, higienis, dan layak konsumsi,” ujar Andi Sumangerukka.

Ia juga menambahkan bahwa fasilitas tersebut telah memenuhi berbagai standar kelaya-

kan. “Saya melihat langsung dapurnya, peralatannya lengkap, bersih, dan memenuhi syarat. Ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” katanya.

Peninjauan lapangan dilakukan secara menyeluruh, mencakup dapur produksi, sistem penyimpanan bahan pangan, hingga mekanisme distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Menurut Gubernur, pendekatan terintegrasi dalam pengelolaan SPPG memungkinkan layanan berjalan lebih efektif dan efisien. “Dengan sistem yang tertata, distribusi makanan bisa tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.

Secara historis, upaya pemenuhan gizi melalui intervensi pemerintah telah menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan nasional. Indonesia sendiri telah lama menjalankan berbagai program perbaikan gizi, termasuk melalui Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang diperkuat sejak dekade 2010-an untuk menekan angka stunting.

Di tingkat global, pendekatan serupa juga diterapkan di berbagai negara melalui program pemberian makanan di sekolah (school feeding program) yang didukung oleh World Food Programme sebagai salah satu strategi efektif meningkatkan kesehatan dan capaian pendidikan anak.

SPPG Polri di

Kendari diharapkan menjadi bagian dari praktik baik tersebut, dengan mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan dalam satu sistem layanan.

Selain dampak kesehatan, program ini juga memberikan efek ekonomi yang signifikan. Kebutuhan bahan pangan untuk operasional dapur membuka peluang bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM lokal untuk terlibat dalam rantai pasok.

“Program ini tidak hanya soal gizi, tetapi juga tentang menggerakkan ekonomi masyarakat. Kita ingin petani dan pelaku usaha lokal ikut merasakan manfaatnya,” kata Gubernur.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara turut mengapresiasi kolaborasi antara Polri dan Badan Gizi Nasional dalam menghadirkan layanan ini. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi program strategis nasional.

Dengan hadirnya SPPG di Kendari, pemerintah berharap angka stunting dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memastikan generasi muda tumbuh sehat dan produktif.

Ke depan, model layanan ini direncanakan akan diperluas ke berbagai wilayah lain di Sulawesi Tenggara guna menjangkau lebih banyak penerima manfaat. (*)

Bupati Buton Tengah Dr Azhari Arahkan RKPD 2027 Dorong Transformasi Ekonomi dan Daya Saing SDM



Pewartu: Komarudin

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Aula Pancana, Kantor Bupati Buton Tengah, Senin (30/3/2026).

Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

"APBD kita terbatas, sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target pembangunan," tegas Muh. Adam Basan dalam sambutannya.

Ia menambahkan, arah kebijakan pembangunan 2027 difokuskan pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju daya saing daerah.

"RKPD 2027 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi sebagai fondasi periode kedua RPJP 2025-2029," ujarnya.

Selain aspek

kualitas SDM juga menjadi perhatian utama, terutama dalam menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan dinamika dunia kerja yang terus berkembang.

Menurutnya, pembangunan harus berbasis skala prioritas, termasuk percepatan pengembangan kawasan perkantoran Labungkari sebagai pusat pemerintahan baru di Buton Tengah.

Musrenbang tersebut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Buton Tengah Mazaluddin, unsur Forkopimda, kepala OPD, perwakilan Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, Bank Sultra Cabang Mawasangka, serta para camat, lurah, kepala desa, dan perencana daerah.

Kepala Bappeda Buton Tengah Samrin Saerani menjelaskan, forum Musrenbang menjadi wadah strategis untuk menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan daerah.

"Musrenbang ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2027," kata Samrin.

Ia menyebutkan, penyusunan RKPD dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara kebi-

jakan pusat, provinsi, dan daerah agar pembangunan berjalan selaras dan efektif.

Dalam konteks tersebut, sejumlah isu strategis menjadi prioritas, di antaranya pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Secara historis, forum Musrenbang telah menjadi bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pendekatan partisipatif dalam pembangunan.

Secara nasional, konsep perencanaan partisipatif ini juga selaras dengan agenda pembangunan global yang diusung dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015.

Pendekatan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam Musrenbang Buton Tengah,

hal ini tercermin dari pelibatan berbagai unsur masyarakat dan lembaga dalam proses penyusunan RKPD.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa setiap program yang dirancang harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat daya saing daerah di tingkat regional.

"Program dan kegiatan tahun 2027 harus mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan PAD daerah," ujarnya.

Di sisi lain, keterbatasan fiskal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan.

Untuk itu, diperlukan inovasi kebijakan serta kerja sama lintas sektor guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Melalui Musrenbang ini, pemerintah daerah berharap dapat menghimpun berbagai aspirasi masyarakat sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027.

Dengan perencanaan yang matang dan partisipatif, diharapkan pembangunan Buton Tengah ke depan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

awal kemerdekaan Indonesia, terutama pada era Presiden Soekarno, sebagai sarana pemererat persatuan bangsa pasca konflik sosial dan politik.

Sementara itu, dalam perspektif global, tradisi berkumpul dan makan bersama setelah hari besar keagamaan juga ditemukan di berbagai negara, seperti perayaan Eid al-Fitr di Timur Tengah dan Asia Selatan, yang menekankan pentingnya rekonsiliasi sosial dan solidaritas komunitas.

Ridwan berharap generasi muda dapat terus menjaga dan melestarikan tradisi Foma-foma'a sebagai warisan budaya yang sarat makna. "Tradisi ini harus diwariskan agar nilai gotong royong dan kebersamaan tetap hidup," tuturnya.

Dengan pelaksanaan yang konsisten setiap tahun, Foma-foma'a diharapkan tidak hanya menjadi agenda budaya, tetapi juga memperkuat kehadisan sosial masyarakat Buton Tengah di tengah tantangan globalisasi.

Kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal tetap relevan dalam membangun harmoni sosial, serta menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan masyarakat di tingkat desa hingga nasional. (*)

Foma-foma'a Jadi Simbol Persatuan Warga Baruta di Buton Tengah Pasca Idulfitri



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP-Pemerintah Desa Baruta bersama masyarakat menggelar tradisi adat Foma-foma'a sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus memperkuat jati diri masyarakat lokal di tengah arus modernisasi, Selasa (31/3/2026). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sanggar Seni dan Budaya Desa Baruta ini menjadi simbol kebersamaan pasca Idulfitri.

Tradisi Foma-foma'a tidak hanya sekadar seremoni tahunan, tetapi telah menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat Desa Baruta, Kecamatan Sangia Wambulu. Kegiatan ini mempertemukan warga lokal dengan para perantau dalam suasana kekeluargaan yang hangat.

Kepala Desa Baruta, Muhammad Ridwan Putra Ota, S.Pd, menegaskan bahwa tradisi ini memiliki nilai spiritual dan sosial yang kuat. "Foma-foma'a merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang diberikan sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan," ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan halal bihalal sebagai momentum saling memaafkan setelah Hari Raya Idulfitri. "Ini bukan hanya tradisi

makan bersama, tetapi juga ruang untuk memperkuat persaudaraan," katanya.

Acara ini dihadiri berbagai unsur, antara lain Asisten I Sekretaris Daerah Buton Tengah Ahmad Sabir, SH, Kepala Dinas Perhubungan La Ota, S.Pd, Wakil Kemandan Batalyon TP 870 Sangia Wambulu, Kapolsek Sangia Wambulu, serta para kepala desa, lurah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat.

Kehadiran para perantau yang kembali ke kampung halaman menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tradisi ini. Mereka turut berbaur dengan warga setempat dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan.

Menurut Ridwan, dukungan seluruh pihak menjadi faktor utama suksesnya kegiatan tersebut. "Kami mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi sehingga tradisi ini dapat berjalan dengan lancar," ujarnya.

Secara historis, tradisi makan bersama seperti Foma-foma'a memiliki kesamaan dengan praktik budaya di berbagai daerah di Indonesia, seperti 'megibung' di Bali atau 'kenduri' di Sumatra, yang sama-sama menekankan nilai kebersamaan dan rasa syukur.

Dalam konteks nasional, tradisi halal bihalal sendiri mulai populer sejak masa

awal kemerdekaan Indonesia, terutama pada era Presiden Soekarno, sebagai sarana pemererat persatuan bangsa pasca konflik sosial dan politik.

Sementara itu, dalam perspektif global, tradisi berkumpul dan makan bersama setelah hari besar keagamaan juga ditemukan di berbagai negara, seperti perayaan Eid al-Fitr di Timur Tengah dan Asia Selatan, yang menekankan pentingnya rekonsiliasi sosial dan solidaritas komunitas.

Ridwan berharap generasi muda dapat terus menjaga dan melestarikan tradisi Foma-foma'a sebagai warisan budaya yang sarat makna. "Tradisi ini harus diwariskan agar nilai gotong royong dan kebersamaan tetap hidup," tuturnya.

Dengan pelaksanaan yang konsisten setiap tahun, Foma-foma'a diharapkan tidak hanya menjadi agenda budaya, tetapi juga memperkuat kehadisan sosial masyarakat Buton Tengah di tengah tantangan globalisasi.

Kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal tetap relevan dalam membangun harmoni sosial, serta menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan masyarakat di tingkat desa hingga nasional. (*)

MoU Kemenkes-KPK 2026-2030 Dorong Tata Kelola Kesehatan Bersih



JAKARTA, BP- Upaya memperkuat integritas sektor kesehatan nasional kembali ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2026-2030, sebagai langkah strategis menekan praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas layanan publik.

Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Budi Gunadi Sadikin dan Setyo Budiyo di Auditorium Dr. J. Leimena, Gedung Adhyatma, Jakarta, Rabu (11/3), yang menjadi titik awal penguatan kolaborasi lintas lembaga dalam pengawasan sektor kesehatan.

Kesepakatan ini menegaskan pentingnya pendekatan pencegahan melalui peningkatan koordinasi, pertukaran data, serta penguatan sistem pengawasan guna menutup celah terjadinya penyimpangan, terutama dalam pengelolaan anggaran kesehatan yang besar.

Ketua KPK Setyo Budiyo menilai kolaborasi ini sebagai langkah krusial dalam membangun sistem pencegahan yang lebih efektif. "Pencegahan yang kuat akan

menghindarkan kita dari proses penindakan yang panjang dan kompleks," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dari tingkat pimpinan hingga ke level operasional. "Pengawasan tidak boleh berhenti di atas. Semua lini harus bergerak agar tidak ada ruang bagi penyimpangan," kata Setyo.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa kompleksitas sektor kesehatan menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga transparansi. Ia menyebut variasi pembiayaan dan layanan membuka potensi celah korupsi jika tidak diatur secara ketat.

"Sektor kesehatan adalah industri yang kompleks. Kita harus memastikan sistemnya transparan dan efisien agar tidak membuka ruang bagi praktik korupsi," ujar Budi.

Ia menambahkan bahwa pembenahan sistem harus berjalan seiring dengan pembangunan budaya kerja yang berintegritas. "Integritas harus dimulai dari pimpinan dan menjadi contoh bagi seluruh jajaran," katanya menegaskan.

Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman se-

belumnya yang berakhir pada Desember 2025, sekaligus memperkuat komitmen berkelanjutan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih di sektor kesehatan.

Dalam konteks historis nasional, sektor kesehatan pernah menjadi sorotan dalam sejumlah kasus korupsi, termasuk pengadaan alat kesehatan pada awal 2010-an yang melibatkan berbagai pihak dan menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan.

Secara global, sektor kesehatan juga dikenal rentan terhadap praktik korupsi. Laporan World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa korupsi dapat menggerus hingga miliaran dolar anggaran kesehatan setiap tahun, yang berdampak langsung pada kualitas layanan dan keselamatan pasien.

Selain itu, Transparency International dalam berbagai kajiannya menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu sektor publik yang memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam pengadaan dan

distribusi obat serta alat kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang berhasil meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tingkat nasional tahun 2025.

Pemberian penghargaan ini diharapkan mampu mendorong unit kerja lain untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan profesional.

Ke depan, kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan KPK diharapkan tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga membangun sistem yang adaptif terhadap tantangan baru, termasuk digitalisasi layanan kesehatan yang memerlukan pengawasan lebih ketat.

Dengan penguatan sinergi ini, pemerintah menargetkan terciptanya sistem kesehatan nasional yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (*)

Tujuh Daerah Lampung-Papua Barat Daya Ikuti Evaluasi Kemenkes

JAKARTA, BP- Kementerian Kesehatan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan kesehatan di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan layanan publik berjalan efektif dan tepat sasaran di masyarakat.

Kegiatan workshop yang digelar secara hibrida tersebut melibatkan tujuh daerah dari Provinsi Lampung dan Papua Barat Daya, yakni Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong.

Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus pertukaran praktik baik antar daerah, dengan fokus pada isu strategis kesehatan seperti penanganan stunting, pengendalian tuberkulosis (TB), HIV, serta penguatan layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.

Kepala Pusat Kebijakan Sistem dan Sumber Daya Kesehatan BKPK, Lupi Trilaksono, menegaskan bahwa kebijakan kesehatan harus dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan, bukan hanya berhenti pada dokumen regulasi.

"Forum ini penting untuk melihat bagaimana kebijakan nasional dijalankan di daerah, sekaligus memahami kendala yang dihadapi di lapangan," ujarnya.

Dalam perspektif historis, isu seperti stunting dan TB telah lama menjadi tantangan kesehatan masyarakat Indonesia. Data global menunjukkan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) masih menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban TB tertinggi di dunia, sementara penurunan stunting menjadi agenda prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

menuju target pembangunan berkelanjutan 2030.

Perwakilan Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes, Palupi, menekankan bahwa keberhasilan kebijakan kesehatan sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah dalam menerjemahkan program nasional.

"Indikator nasional hanya dapat tercapai jika kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat di daerah," kata Palupi.

Menurut Kemenkes, sinkronisasi antara pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program kesehatan berjalan konsisten, efektif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki karakter geografis dan sosial sangat beragam.

Dari sisi implementasi daerah, Kabupaten Sorong Selatan melaporkan pengembangan sistem pemantauan kebijakan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai langkah digitalisasi tata kelola kesehatan daerah.

Sementara itu, Kabupaten Lampung Selatan memaparkan keberhasilan integrasi berbagai program kesehatan dalam satu kerangka kebijakan daerah untuk memperkuat upaya pencegahan penyakit secara terpadu.

Di Kota Metro, pemerintah daerah melakukan pembaruan regulasi kesehatan lingkungan untuk menjawab tantangan kesehatan perkotaan yang semakin kompleks akibat urbanisasi dan perubahan pola hidup masyarakat.

Adapun Kota Bandar Lampung menitikberatkan kebijakan pada penetapan wilayah prioritas penanganan stunting, sebagai strategi percepatan penurunan angka kekurangan gizi kronis pada anak.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Pringsewu, Ali Subagiyo, menyampaikan bahwa penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi fokus utama daerahnya dalam memperbaiki kualitas layanan kesehatan.

"Pemerintah daerah terus memperkuat regulasi agar program kesehatan lebih terarah dan mampu mendorong koordinasi lintas sektor," ujarnya.

Meski berbagai inovasi telah dilakukan, sejumlah tantangan masih dihadapi daerah, mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan, ketimpangan sarana dan prasarana, hingga belum optimalnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.


Tiga Analisis Kebijakan Ahli Utama Kemenkes, yakni Wiendra Waworuntu, Riati Angraini, dan Oscar Primadi, menegaskan bahwa kesenjangan implementasi tersebut harus segera diatasi agar pelayanan kesehatan lebih merata dan berkeadilan.

Secara global, isu penguatan sistem kesehatan daerah juga menjadi perhatian banyak negara. Dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), penguatan layanan kesehatan primer menjadi salah satu strategi utama untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage).

Melalui workshop ini, Kemenkes berharap setiap daerah dapat saling bertukar pembelajaran untuk memperkuat kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal sekaligus selaras dengan kebijakan nasional.

Evaluasi berkala dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan negara hadir secara efektif dalam menjamin hak kesehatan masyarakat.

Pada akhirnya, hasil evaluasi ini diharapkan mampu mendorong transformasi layanan kesehatan yang lebih responsif, merata, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. (*)

<p>PT FAREN GRAFIKA</p>  <p>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</p> <p>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruokan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</p>	<p>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasctio Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman</p>	<p>Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak: Jamaludin</p>	<p>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</p>	<p>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri</p> <p>Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun</p> <p>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</p>
<p>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</p> <p>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</p>				

KPK Perpanjang Masa Tahanan Gus Alex 40 Hari di Kasus Kuota Haji



KPK perpanjang penahanan Ishfah Abidal Aziz dan Yaqut Cholil Qoumas selama 40 hari terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP_Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah masa penahanan Staf Khusus mantan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas yang bernama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selama 40 hari. Perpanjangan penahanan tersebut terhitung sejak Jumat, 3 April 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024.

“Penyidik melakukan perpanjangan pertama penahanan untuk tersangka saudara IAA [Ishfah Abidal Aziz] untuk 40 hari ke depan setelah kemarin dilakukan penahanan pertama untuk 20 hari,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Minggu (5/4).

Pada pekan depan, Budi menyatakan penyidik akan melakukan serangkaian pemeriksaan ter-

hadap para pihak dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Pemeriksaan berlangsung di Kantor KPK dan di sejumlah daerah.

“Dalam perkara ini, penyidik minggu depan juga akan mulai maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di antaranya para PIHK dan pemeriksaan di antaranya dilakukan di Jakarta atau di Gedung KPK Merah Putih dan juga di beberapa daerah lainnya bergantung dari lokasi para PIHK atau biro travel tersebut,” ucap Budi

KPK juga sudah melakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari terhadap Yaqut.

Berdasarkan perhitungan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 diduga merugikan keuangan negara sejumlah Rp622 miliar.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK menemukan lebih

dari 300 agen perjalanan haji dan umrah di hampir seluruh wilayah di Indonesia menerima kuota yang sudah diatur sebelumnya.

Budi memastikan penyidik akan berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan aset negara yang hilang akibat perbuatan melawan hukum para tersangka kasus korupsi.

“Terlebih fokus penyidik adalah bagaimana mengoptimalkan aset atau asset recovery. Kalau kita melihat hasil hitung dari BPK, nilai kerugian keuangan negaranya mencapai lebih dari Rp600 miliar. Tentu ini juga menjadi fokus bagi penyidik supaya nanti asset recovery dari perkara ini juga bisa optimal,” katanya.

Selain Yaqut dan Ishfah yang sudah ditahan, KPK pada Senin (30/3) kemarin baru saja mengumumkan dua orang tersangka baru.

Mereka ialah Direktur Operasional PT

Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba.

Ismail dan Asrul disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf (c) UU KUHP.

Ismail dan Asrul diduga berperan aktif dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta adanya pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara dalam hal ini sejumlah pejabat di Kementerian Agama.(*)

MK: Lembaga Negara yang Berwenang Audit Kerugian Negara adalah BPK

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara.

Pandangan tersebut termuat dalam putusan perkara nomor: 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026. Putusan ini diambil oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir masing-masing sebagai anggota.

Pemohon perkara tersebut adalah dua mahasiswa bernama Bernita Matondang dan Vandy Setiawan yang menguji materi Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemohon I sebagai vendor pihak ketiga, sedangkan Pemohon II merupakan mahasiswa Ilmu Hukum.

MK menyatakan konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual.

MK Minta Uang Pensiun Wakil Rakyat Direvisi, DPR Usul Buat Pansus Dulu

Artinya, kerugian negara tersebut sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi atau lembaga yang berwenang.

Konsepsi demikian, menurut MK, memiliki persamaan dengan Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023 (UU KUHP) yang memberikan pengertian bahwa “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan”.

“Oleh karena itu, dengan mengacu

pada Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023, maka lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, ‘Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri’,” bunyi pertimbangan MK dikutip Minggu (5/4).

Lebih lanjut, MK menambahkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menyatakan BPK juga memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.

Kewenangan BPK untuk menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian negara dimaksud memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum atas tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.

“Berkaitan dengan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sebagai implikasi dari perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024, berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor,” ucap MK.

“Dalil para Pemohon berkenaan dengan ketiadaan parameter normatif yang jelas menge-

nai siapa yang berwenang menetapkan kerugian, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil audit tersebut mengikat hakim dalam proses pembuktian pada frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sehingga menempatkan unsur delik pada ruang tafsir yang tidak terukur dan tidak dapat diprediksi adalah tidak beralasan menurut hukum,” tegas MK.

Permohonan dua mahasiswa itu pun ditolak MK untuk seluruhnya.

“Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo.

Dalam permohonannya, Bernita dan Vandy mengungkapkan ada ketidakjelasan pada Pasal 603 KUHP mengenai lembaga audit keuangan negara, mekanisme pemeriksaan, serta standar penilaian kerugian keuangan negara.

Para Pemohon meminta MK menyatakan frasa ‘kerugian keuangan negara’ dalam Pasal 603 dan Pasal 604 UU KUHP bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat.

Para Pemohon juga meminta kerugian negara itu ditetapkan berdasarkan alat bukti yang sah dan dinilai oleh hakim dalam proses peradilan pidana.

“Sepanjang tidak dimaknai bahwa pembuktian kerugian keuangan negara tidak bersifat eksklusif dan tertutup hanya pada hasil pemeriksaan lembaga audit tertentu, melainkan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dan dinilai secara independen oleh hakim dalam proses peradilan pidana,” bunyi petitusi Para Pemohon.(*)

Kawasan Wisata Oputa Yi Koo Jadi Prioritas Penataan Lingkungan, Baubau Dukung Program Nasional



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau memastikan gerakan kebersihan lingkungan akan terus berlanjut secara berkelanjutan di seluruh wilayah kota melalui program "Indonesia Asri" yang digalakkan secara nasional. Komitmen tersebut ditegaskan melalui aksi bersih-bersih massal yang digelar di kawasan Kotamara, Sabtu (4/4/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat budaya hidup bersih, sekaligus menata ruang publik agar lebih representatif sebagai pusat aktivitas masyarakat dan destinasi wisata.

Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si., yang memimpin

langsung kegiatan tersebut, menegaskan bahwa gerakan ini tidak bersifat seremonial semata, melainkan upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat.

"Upaya Indonesia Asri ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi gerakan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan," ujar La Ode Darus Salam.

Aksi bersih-bersih tersebut melibatkan seluruh unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, hingga masyarakat pada tingkat RT dan RW, yang secara serentak melakukan pembersihan di sejumlah titik strategis.

Kawasan Monumen Patung Oputa Yi Koo dipilih sebagai lokasi utama kegiatan karena memiliki nilai

strategis sebagai ikon Kota Baubau yang kerap menjadi pusat kunjungan masyarakat.

Selain itu, lokasi tersebut tengah dipersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan coffee morning bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (5/4/2026).

"Area ini kami prioritaskan karena akan digunakan untuk agenda penting pemerintah daerah dalam waktu dekat," katanya.

Pemerintah Kota Baubau juga telah berkoordinasi dengan pihak Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara terkait penggunaan sementara kawasan tersebut, mengingat status asetnya yang masih berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Dalam waktu dekat, aset Monumen Patung Oputa Yi Koo direncanakan akan diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kota Baubau, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara optimal oleh pemerintah daerah.

La Ode Darus Salam menambahkan, kegiatan serupa telah dilaksanakan sejak sebelum bulan Ramadan dengan menyalurkan berbagai titik di wilayah kota.

"Kami sudah memulai gerakan ini sejak sebelum Ramadan dan akan terus melanjutkannya secara konsisten di seluruh wilayah," ujarnya.

Wali Kota Baubau, lanjutnya, telah mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh camat dan lurah agar memastikan program Indonesia Asri ber-

Pemkot Baubau Rancang 10 Proyek Strategis untuk Tingkatkan Konektivitas

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau menargetkan pelaksanaan sepuluh Proyek Strategis Daerah (PSD) mulai berjalan pada kuartal pertama tahun 2026 sebagai upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.

Program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 ini difokuskan pada sektor infrastruktur dan kesehatan, dengan harapan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat konektivitas antar-wilayah.

Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kota Baubau, Ahmad Basri, mengatakan seluruh proyek akan dilaksanakan melalui mekanisme tender terbuka guna menjamin transparansi dan kualitas hasil pekerjaan.

"Seluruh paket pekerjaan akan melalui proses tender yang transparan agar menghasilkan peker-

jaan berkualitas dan tepat waktu," ujar Ahmad Basri dalam keterangan persnya, Rabu (11/03/2026).

Ia menambahkan, penetapan proyek strategis tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Penetapan proyek strategis ini merupakan salah satu indikator MCP KPK yang harus dipenuhi pemerintah daerah," katanya.

Sepuluh proyek strategis tersebut berada di bawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Kesehatan Kota Baubau.

Adapun daftar proyek meliputi rehabilitasi Puskesmas Waborobo, rehabilitasi berat Puskesmas Lakologou, serta revitalisasi kawasan Pasar Wameo yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, terdapat pula penataan kawasan Lakologou tahap lan-

jukan dan revitalisasi kawasan Kotamara yang diarahkan untuk memperkuat tata ruang kota.

Di sektor infrastruktur dasar, pemerintah juga merencanakan pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan jalur khusus guna mendukung kebutuhan air bersih masyarakat.

Sejumlah proyek rekonstruksi jalan juga menjadi prioritas, di antaranya ruas jalan kompleks Lowu-Lowu, kompleks Sulaa tahap II, serta jalan Dr Wahidin yang memiliki peran penting dalam mobilitas warga.

Tidak hanya itu, penataan kawasan Lembah Hijau juga masuk dalam daftar proyek strategis sebagai bagian dari pengembangan ruang terbuka dan kawasan hijau kota.

Ahmad Basri menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut dirancang sebagai "engine of growth" yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. (*)

jalan hingga ke tingkat lingkungan terkecil.

Instruksi tersebut menekankan pentingnya peran aparat wilayah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat guna menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Secara historis, gerakan kebersihan lingkungan di Indonesia telah menjadi bagian dari kebijakan nasional sejak era Orde Baru melalui program kebersihan kota (K3), yang kemudian berkembang menjadi berbagai inisiatif seperti Adipura dan ger-

akan lingkungan berbasis masyarakat.

Dalam konteks global, kampanye serupa juga telah lama digaungkan, seperti program "Clean Up the World" yang dimulai pada 1993 di Australia dan kini melibatkan jutaan relawan dari berbagai negara dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Gerakan Indonesia Asri yang kini diadopsi di berbagai daerah, termasuk Kota Baubau, mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam menjawab tantangan urbanisasi dan penge-

lolaan lingkungan hid-up.

"Kami berharap gerakan ini terus dilakukan dari tingkat kota hingga RT dan RW, sehingga kebersihan menjadi budaya bersama," kata La Ode Darus Salam.

Dengan keterlibatan lintas sektor dan masyarakat, Pemerintah Kota Baubau optimistis penataan kawasan publik seperti Kotamara akan semakin meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata. (*)

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON BUTON SELATAN
 Jl. Gajah Mada, Lawela, Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Tlp 0811407036

PENGUMUMAN TENTANG SURAT SERTIFIKAT HILANG
 Nomor : 2/D1304-21.15/IV/2026

Untuk mendapatkan Sertifikat baru sebagai pengganti Sertifikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	Keterangan
01	21.15.01.02.1.00602	WA EDA	TANAH RATA KECAMATAN SIMAU	12/06/2023	Berdasarkan surat keterangan tanda laporan kehilangan Nomor SKTLK/70/IV/2026/SPKT/POLRES BUTON DI PASAR WAJO/POLDA SULAWESI TENGGARA tertanggal 7 APRIL 2026 dan surat pernyataan dibawah sumpah dan janji tanggal 7 April 2026

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut diatas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

BATAUGA, 07 April 2026
 Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan
 Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan
 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan

Nomor Berkas : 1932/2026
 Nama Pemohon : WA EDA
 D1301 : 62/2026

ttd

MOHAMMAD ZAKARIA S.ST., M.SC
 NIP. 197803011998031001

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON BUTON SELATAN
 Jl. Gajah Mada, Lawela, Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Tlp 0811407036

PENGUMUMAN TENTANG SURAT SERTIFIKAT HILANG
 Nomor : 1/D1304-21.15/IV/2026

Untuk mendapatkan Sertifikat baru sebagai pengganti Sertifikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	Keterangan
01	21.15.03.03.1.00101	LA ODE JAHALI	Dusun Rumbia Dusun BURANGASI	06/06/2018	Berdasarkan surat keterangan tanda laporan kehilangan Nomor SKTLK/16/II/2026/SPKT/POLSEK Lapandewa/POLRES BUTON PASAR WAJO/POLDA SULAWESI TENGGARA tertanggal 24 Februari 2026 dan surat pernyataan dibawah sumpah dan janji tanggal 6 April 2026

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut diatas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

BATAUGA, 07 April 2026
 Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan
 Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan
 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan

Nomor Berkas : 1205/2026
 Nama Pemohon : LA ODE ASRI
 D1301 : 48/2026

ttd

MOHAMMAD ZAKARIA S.ST., M.SC
 NIP. 197803011998031001